

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PREFERENSI POLITIK PEMILIH PEMULA MENJELANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI DESA PALAPI KECAMATAN TAOPA

Basran Sirula

Prodi PPKn, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Email: basransirulah@gmail.com

Abstract:

This study examines the impact of social media on the political preferences of first-time voters ahead of the 2024 Simultaneous Elections in Palapi Village, Taopa District. The study was conducted using qualitative methods using a descriptive approach, collecting data through observation, in-depth interviews, and documentation relevant to the research focus. This approach provides a comprehensive overview of the real conditions on the ground. The results indicate that social media significantly influences the political preferences of first-time voters, as most information regarding the implementation of the 2024 Simultaneous Elections is obtained from social media, with a broader reach than conventional methods, which tend to be one-way. However, not all information on social media is factual, as there are also hoaxes that can be misleading. Therefore, strengthening digital literacy is crucial to prevent first-time voters from being easily influenced by inaccurate information. Furthermore, the impact of social media on the political preferences of first-time voters ahead of the elections can be analyzed through three main aspects: cognitive, affective, and evaluative.

Keywords: Social Media, Political Preferences, First-Time Voters, Election

Abstrak:

Penelitian ini menelaah dampak media sosial terhadap preferensi politik pemilih pemula menjelang Pemilu Serentak 2024 di Desa Palapi, Kecamatan Taopa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan data lewat observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh signifikan terhadap preferensi politik pemilih pemula, karena sebagian besar informasi mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 diperoleh dari media sosial dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan metode konvensional yang cenderung satu arah. Namun, tidak semua informasi di media sosial bersifat faktual, sebab terdapat pula hoaks yang dapat menyesatkan, sehingga penguatan literasi digital menjadi penting agar pemilih pemula tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid. Selain itu, dampak media sosial terhadap preferensi politik pemilih pemula menjelang pemilu dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif.

Kata Kunci: Media Sosial, Preferensi Politik, Pemilih Pemula, Pemilu.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjadikan pemilihan umum sebagai salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kepemimpinan nasional. Pemilu menjadi instrumen penting dalam mewujudkan

kedaulatan rakyat, karena melalui mekanisme inilah masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, pemilu di Indonesia telah berkembang menjadi sebuah tradisi politik yang diadakan setiap lima

tahun sekali. Pemilu tidak hanya dipandang sebagai proses prosedural belaka untuk mengisi jabatan-jabatan publik, tetapi juga sebagai pesta demokrasi rakyat, yakni momen di mana seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif menentukan arah kebijakan bangsa.

Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menjadi wujud nyata dari prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya terlihat dari hadirnya pemilih di Tempat Pemungutan Suara, tetapi juga dari keterlibatan dalam pengawasan, pendidikan politik, hingga keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang ikut mengawal jalannya proses demokrasi. Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan pemilu, mulai dari prinsip penyelenggaraan, kelembagaan, peserta pemilu, tahapan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan pemilu di Indonesia berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 20 menegaskan bahwa pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih. Menurut (Zaky, 2009) dan (Ganewati, 2009) yang berkesimpulan ama bahwa pemilih pemula juga mencakup mereka yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali

dalam sejarah hidup mereka, sehingga tidak sekadar memenuhi syarat administratif, tetapi juga menandai proses transisi penting dalam perjalanan kewarganegaraan seseorang. Kelompok pemilih pemula ini memiliki arti strategis karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang memenuhi syarat penuh untuk berpartisipasi dalam pemilu, dengan suara yang tidak hanya menambah jumlah partisipasi, tetapi juga mencerminkan wajah generasi baru dalam menentukan arah demokrasi dan kepemimpinan nasional.

Tentunya keberhasilan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaannya, sebab demokrasi sejatinya hidup ketika rakyat menggunakan hak politiknya untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa melalui pemilu. Dalam konteks pemilu serentak tahun 2024, keterlibatan pemilih pemula menjadi faktor yang sangat penting, mengingat kelompok ini mendominasi jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah pemilih pemula mencapai sekitar 204,8 juta jiwa, atau mencapai 52% hal tersebut menandakan bahwa jumlah pemilih yang terlibat dalam perhelatan pemilu 2024 di dominasi pemilih pemula, sehingganya keberhasilan proses demokrasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif pemilih pemula. Dengan dominasi yang begitu besar, pemilih pemula bukan hanya sekadar tambahan angka dalam daftar pemilih, melainkan menjadi penentu arah masa depan bangsa, sebab pilihan politik mereka akan berimplikasi langsung terhadap lahirnya kebijakan, arah

pembangunan, serta wajah demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Dengan data yang menunjukkan besarnya jumlah pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, jelas bahwa peran mereka sangatlah penting dan strategis. Pemilih pemula memiliki posisi istimewa karena selain baru pertama kali menggunakan hak pilih, mereka juga membawa energi dan semangat baru dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, membangun preferensi politik yang sehat agar mereka menjadi pemilih cerdas merupakan hal yang utama. Pemilih cerdas berarti mampu menentukan pilihan politiknya secara mandiri, rasional, serta tanpa tekanan atau keterpaksaan dari pihak lain, baik keluarga, teman, maupun kelompok tertentu. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi, karena suara pemilih pemula bukan hanya sekedar angka dalam statistik, tetapi juga penentu arah kebijakan dan kepemimpinan nasional. Dengan kesadaran politik yang matang, pemilih pemula akan mampu menghindari praktik-praktik manipulatif seperti politik uang, kampanye hitam, maupun tekanan kelompok, sehingga pilihan yang diambil benar-benar berdasarkan keyakinan pribadi yang kuat.

Di sisi lain, era modern dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi pemilih pemula. Media sosial kini menjadi sumber utama informasi politik, sekaligus sarana komunikasi publik yang paling dekat dengan generasi muda. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi pola komunikasi antar individu, tetapi juga

mengubah cara kerja birokrasi, pemerintahan, serta dinamika politik secara keseluruhan. Istilah “politik digital” semakin populer karena transformasi digital telah menggeser model kampanye konvensional menuju strategi komunikasi yang berbasis media sosial yang dinilai lebih efektif dan efisien. Menurut (Effendy, 2022) bahwa media sosial tidak hanya sekedar berfungsi untuk sebagai sarana sosialisasi, melainkan juga menajdi ruang diskusi, kampanye, dan menyebarkan politik secara luas dan cepat. Sehingga adanya media sosial lebih cepat dalam memperoleh informasi.

Mensinyalir kondisi tersebut, media sosial dapat dipahami sebagai salah satu tolok ukur utama dalam meningkatkan preferensi politik pemilih pemula, sebab pada era digital sekarang ini mayoritas dari mereka adalah pengguna aktif berbagai platform media sosial. Kehadiran media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tetapi juga telah menjelma menjadi arena politik tempat informasi, gagasan, dan wacana politik diproduksi serta dikonsumsi secara cepat dan masif. Bagi pemilih pemula yang umumnya sedang berada pada fase pencarian identitas politik, media sosial menjadi saluran utama untuk memperoleh informasi mengenai kandidat, partai, maupun isu-isu politik yang berkembang. Kondisi ini tentu memberikan peluang besar dalam membentuk preferensi politik yang rasional dan independen, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan berupa risiko terpapar hoaks, disinformasi, dan propaganda politik yang tidak sehat. Oleh karena itu, literasi digital serta kemampuan

berpikir kritis sangat diperlukan, agar pemilih pemula mampu menggunakan media sosial secara bijak, menyaring informasi yang kredibel, serta menghindari pengaruh manipulatif, sehingga preferensi politik yang mereka bangun benar-benar berdasarkan kesadaran pribadi dan pemahaman yang objektif terhadap realitas politik yang ada.

Media sosial sebagai sarana informasi dalam meningkatkan preferensi politik pemilih pemula pada dasarnya sangat ditentukan oleh sejauh mana pemilih itu sendiri mampu memanfaatkan media sosial secara bijak dan kritis. Artinya, media sosial hanya akan berfungsi optimal bila pengguna mampu memilah informasi yang kredibel dari arus informasi yang begitu deras. Temuan Aziza (2022) menegaskan bahwa media sosial terbukti dapat meningkatkan preferensi politik pemilih pemula, karena sifatnya yang praktis, cepat, dan mudah diakses sehingga memudahkan generasi muda untuk memperoleh informasi terkait politik kapan saja dan di mana saja. Keunggulan ini membuat pemilih pemula lebih dekat dengan isu-isu politik terkini dan berpotensi membentuk sikap serta pilihan politik mereka. Almond dalam (Efriza, 2012) dalam mengukur preferensi politik pemilih pemula dapat dilihat dari kognitif, afektif dan evaluatif.

Temuan (Yunus, Tamma, & Ekawaty, 2022) menunjukkan bahwa peningkatan preferensi politik pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh keberadaan media sosial yang kini menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi terkait politik, hak, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui media

sosial, pemilih pemula mendapatkan akses cepat terhadap isu-isu aktual, perdebatan politik, sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang lebih luas tentang peran mereka sebagai warga negara. Informasi yang diperoleh di dunia digital ini juga mendorong kesadaran kritis untuk menilai kualitas kandidat, memahami kebijakan, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menggunakan hak pilih. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan politik yang signifikan, yang secara langsung membentuk preferensi politik generasi muda agar lebih rasional, sadar, dan partisipatif dalam proses demokrasi.

Efektif efisiennya media sosial dalam meningkatkan preferensi politik pemilih pemula pada dasarnya sangat bergantung pada bagaimana pemilih itu sendiri memanfaatkannya. Media sosial memang menyediakan akses informasi yang luas, cepat, dan interaktif, namun kebermanfaatannya ditentukan oleh kemampuan individu dalam memilah dan mencerna informasi yang tersedia. Jika pemilih pemula memiliki literasi digital yang baik, mereka dapat menggunakan media sosial untuk memperkaya pengetahuan politik, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta membentuk sikap politik yang rasional dan mandiri. (Hamid & Hamim, 2023) dalam temuannya melalui literasi politik dapat meningkatkan preferensi politik pemilih pemula sehingganya sebagai generasi penerus yang nantinya akanharapan untuk mewujudkan pembangunan bangsa kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan politik bagi pemilih pemula perlu dipahami sebagai sebuah kebutuhan fundamental, bukan sekadar tambahan dalam proses demokrasi. Pemilih pemula, khususnya generasi muda yang baru memasuki ranah politik praktis, menghadapi tantangan besar berupa derasnya arus informasi, termasuk informasi yang sering kali bercampur antara fakta, opini, dan disinformasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik berfungsi sebagai “filter” intelektual yang memungkinkan pemilih pemula mengembangkan kerangka berpikir kritis sebelum membentuk preferensi politiknya. Sebagaimana ditegaskan oleh (Mahmud, Ahmad, Dahiba, & Nurdin) proses ini bukan hanya soal mengenalkan sistem politik secara kognitif, melainkan membentuk habitus politik yang partisipatif dan berorientasi pada rasionalitas.

Selain itu juga, pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula menuntut adanya penguatan kognitif. Aspek kognitif mengacu pada kemampuan untuk memahami konsep dasar demokrasi, mekanisme pemilu, peran partai politik, serta konsekuensi pilihan politik. Tanpa basis kognitif yang kuat, pemilih pemula mudah terombang-ambing oleh politik simbolik dan retorika populis. Oleh karena itu, proses edukasi politik harus dikemas secara sistematis, terstruktur, dan berbasis bukti, agar pemilih pemula tidak hanya mengenali simbol-simbol politik, tetapi juga mampu menilai substansi kebijakan yang ditawarkan. Penguatan kognitif ini sekaligus menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan preferensi politik yang lebih matang dan bertanggung jawab.

Preferensi politik pemilih pemula tidak dapat dipandang hanya sebagai hasil pengetahuan, tetapi juga sebagai cerminan dari interaksi antara aspek afektif dan evaluatif. Orientasi afektif merujuk pada keterikatan emosional pemilih terhadap figur, partai, atau isu tertentu. Di sinilah sering muncul tantangan, karena pemilih pemula cenderung mudah terpengaruh oleh karisma tokoh atau narasi emosional yang viral di media sosial. Sementara itu, orientasi evaluatif menuntut pemilih untuk menimbang pilihan berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas kandidat. Dengan demikian, pendidikan politik yang ideal harus mampu menyeimbangkan ketiga orientasi yakni, kognitif, afektif, dan evaluative agar preferensi politik tidak sekadar emosional, melainkan juga kritis dan rasional.

Dalam konteks pemilu serentak 2024, urgensi pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi semakin nyata. Pemilu serentak menghadirkan kompleksitas tinggi karena pemilih dihadapkan pada banyak pilihan sekaligus, mulai dari legislatif hingga eksekutif. Tanpa bekal pendidikan politik yang memadai, pemilih pemula berpotensi mengalami disorientasi, yang berujung pada pilihan pragmatis tanpa pertimbangan mendalam. Di sisi lain, apabila pendidikan politik dilakukan secara serius, maka pemilih pemula justru dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya pemilu yang lebih berkualitas. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud melalui keterlibatan warga negara yang kritis, partisipatif, dan cerdas.

Berdasarkan hasil observasi, media sosial terbukti mampu meningkatkan preferensi politik pemilih pemula karena melalui platform ini mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai perkembangan pemilu serentak tahun 2024 secara cepat dan luas. Aksesibilitas media sosial memungkinkan pemilih pemula mengikuti isu-isu politik terkini, mengenal kandidat, serta memahami mekanisme pemilu dengan cara yang lebih praktis, sehingga sumber informasi tidak hanya terfokus pada baliho, stiker, maupun brosur pada umumnya hanya menampilkan pesan visual yang sederhana dan sering kali bersifat satu arah tanpa memberikan ruang untuk klarifikasi maupun diskusi lebih lanjut. Sebaliknya, media sosial menghadirkan ekosistem digital yang memungkinkan arus informasi politik bergerak cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Hal ini menjadikan media sosial sebagai medium yang tidak hanya memperkenalkan kandidat dan program politik, tetapi juga membuka peluang bagi pemilih muda untuk melakukan penilaian kritis berdasarkan berbagai sumber informasi yang mereka terima.

Selain sebagai sumber informasi, media sosial juga menjadi ruang interaksi sosial-politik yang memperkuat keterlibatan pemilih pemula. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp tidak hanya digunakan sebagai kanal kampanye, tetapi juga ruang diskusi tempat masyarakat muda saling bertukar pandangan, memberikan komentar, hingga berdebat mengenai isu-isu politik. Dinamika ini menciptakan pengalaman politik yang lebih partisipatif dibandingkan sekadar

menerima pesan pasif dari baliho atau brosur. Interaksi tersebut mendorong pemilih pemula untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga aktor aktif dalam membentuk dan menyebarkan opini politik di lingkungannya. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai katalis yang mempercepat proses sosialisasi politik sekaligus memperluas basis partisipasi generasi muda. Oleh sebab itu, merujuk dari berbagai temuan di atas dalam melihat preferensi politik pemilih pemula berdasarkan pada orientasi kognitif, afektif dan evaluatif.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tujuan utama memperoleh data yang benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan terkait dampak media sosial terhadap preferensi politik pemilih pemula menjelang Pemilu 2024 di Desa Palapi, Kecamatan Taopa. Pemilihan pendekatan deskriptif dilakukan karena mampu menggambarkan secara jelas dan rinci problematika yang muncul baik sebelum maupun sesudah proses pemilihan, khususnya dalam melihat bagaimana media sosial memengaruhi pola pikir, sikap, dan keputusan politik pemilih pemula. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat formal dan tekstual, tetapi juga menggambarkan pengalaman nyata, pandangan, serta perasaan pemilih pemula ketika menjalankan hak pilih mereka. Hal ini memungkinkan peneliti menyajikan hasil yang

sesuai dengan dinamika sosial-politik di lapangan, termasuk pengaruh signifikan media sosial dalam membentuk orientasi politik generasi muda. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana arus informasi digital tidak hanya memengaruhi preferensi politik, tetapi juga mengarahkan sikap pemilih pemula untuk lebih sadar, kritis, dan selektif dalam menentukan pilihan politiknya. Sebagaimana dikemukakan (Sugiyono, 2013), penelitian kualitatif deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan sekaligus memberikan gambaran menyeluruh terhadap objek yang diteliti, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami fenomena politik kontemporer di kalangan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Media Sosial Terhadap Preferensi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

Partisipasi pemilih pemula dalam setiap penyelenggaraan Pemilu selalu menunjukkan adanya orientasi dan preferensi politik yang beragam, baik pada level individu maupun kelompok kepentingan. Orientasi politik inilah yang kemudian membentuk preferensi politik seseorang dalam merumuskan serta merefleksikan kepentingan politik ketika menentukan pilihan maupun memberikan dukungan. Dengan kata lain, pilihan politik warga negara dalam Pemilu merupakan representasi dari orientasi politik yang dimilikinya. Terkait dengan pemilih pemula,

mayoritas hasil penelitian menegaskan bahwa kelompok ini sangat rentan menghadapi persoalan orientasi politik. Kerentanan tersebut muncul karena keterbatasan pengetahuan tentang mekanisme Pemilu, minimnya pengalaman, serta kecenderungan sikap dan pilihan politik mereka yang lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua maupun figur-figur tertentu di masyarakat.

Pada konteks ini, keterlibatan pemilih pemula dalam Pemilu Serentak 2024 tidak dapat dipandang hanya sebagai aspek simbolis belaka, melainkan menjadi faktor penentu dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa selama lima tahun mendatang. Data resmi yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula mencapai sekitar 52% dari total keseluruhan pemilih di Indonesia. Angka ini menegaskan bahwa pemilih pemula merupakan kelompok mayoritas yang berpotensi besar mendominasi hasil pemilu. Oleh karena itu, membentuk karakter pemilih pemula yang kritis, cerdas, dan rasional menjadi kebutuhan mendesak. Kualitas partisipasi mereka akan sangat ditentukan oleh bagaimana preferensi politik dibangun, diarahkan, dan dikembangkan menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dengan kata lain, preferensi politik pemilih pemula bukan sekadar cerminan pilihan individual, tetapi sekaligus gambaran masa depan demokrasi Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan preferensi politik pemilih pemula, salah satu strategi yang efektif adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya melalui media sosial. Platform media sosial menjadi

ruang yang sangat dinamis, di mana pemilih pemula tidak hanya menerima informasi secara satu arah, melainkan juga dapat mengakses beragam informasi dari berbagai sudut pandang mengenai tokoh politik maupun partai yang ikut serta dalam kontestasi. Keunggulan ini memungkinkan pemilih pemula memiliki referensi yang lebih luas dalam membentuk kesadaran politiknya. Akan tetapi, informasi yang beredar di media sosial tidak selalu akurat atau valid. Banyak di antaranya yang justru menyesatkan (hoaks). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi pemilih pemula yang masih dalam tahap pencarian orientasi politik, karena potensi untuk termakan arus disinformasi cukup tinggi.

Oleh sebab itu, literasi digital menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh pemilih pemula. Kemampuan untuk menyaring, membandingkan, dan mengevaluasi setiap informasi yang diperoleh di media sosial merupakan keterampilan mendasar agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh propaganda maupun konten manipulatif. Dengan cara demikian, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi politik yang produktif, bukan sekadar sebagai ruang konsumsi informasi tanpa kendali. Dengan demikian, kecerdasan dalam menggunakan media sosial bukan hanya terkait keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut kesadaran kritis dan etika dalam berinteraksi dengan informasi politik. Pemilih pemula yang mampu menguasai keterampilan ini akan lebih siap dalam menentukan pilihan politiknya secara cerdas, rasional, dan sesuai dengan kepentingan demokrasi jangka panjang.

Selain memiliki keunggulan dari segi efektivitas dan efisiensi dalam membentuk preferensi politik pemilih pemula, media sosial menurut (Kaplan & Haenlein, 2010) dipahami sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaanya bertukar informasi secara cepat dan interaktif. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial, fungsi media sosial mengalami perluasan yang signifikan. (Effendy, 2022) menegaskan bahwa media sosial tidak lagi hanya dipahami sebagai sarana untuk berinteraksi atau menjalin komunikasi sosial, melainkan telah berevolusi menjadi ruang publik modern. Dalam ruang ini, media sosial memainkan peran yang lebih kompleks, yakni sebagai arena diskusi politik, wadah kampanye yang dapat menjangkau khalayak luas, sekaligus sebagai saluran penyebaran informasi yang berlangsung cepat, massif, dan dinamis. Transformasi ini menempatkan media sosial pada posisi strategis dalam proses demokrasi kontemporer, terutama karena ia mampu membentuk kesadaran politik generasi muda sekaligus memengaruhi preferensi politik pemilih pemula, yang pada akhirnya menentukan kualitas partisipasi politik mereka di masa depan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wantu, Mahmud, Monoarfa, & Nurdin (2023) yang menunjukkan bahwa sebagian besar informasi mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang diterima oleh pemilih pemula bersumber langsung dari media sosial. Artinya, media sosial kini menempati posisi dominan dalam memengaruhi cara pandang dan sikap politik pemilih pemula, bahkan menggeser fungsi

media konvensional sebagai sumber utama informasi politik. Dengan kata lain, media sosial telah bertransformasi menjadi medium yang tidak hanya menyajikan informasi secara cepat, tetapi juga mampu membentuk opini publik, termasuk di kalangan pemilih pemula yang masih dalam tahap membangun orientasi politiknya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa preferensi politik generasi muda dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024 tidak bisa dilepaskan dari pengaruh signifikan media sosial sebagai arena komunikasi politik modern.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap preferensi politik pemilih pemula di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, karena sebagian besar informasi politik yang mereka peroleh bersumber dari platform digital tersebut. Banyaknya informasi yang tersebar melalui media sosial membuat pemilih pemula lebih mudah terpapar pada isu-isu politik, tokoh, maupun partai yang sedang menjadi perbincangan publik. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi cara mereka memahami dinamika politik, tetapi juga membentuk kecenderungan dalam menentukan pilihan politik menjelang pemilu. Dengan kata lain, media sosial berfungsi sebagai faktor dominan yang menstrukturkan orientasi politik generasi muda di Taopa, meskipun pada saat yang sama masih menyisakan tantangan berupa perlunya kemampuan kritis dalam memilah informasi yang benar dan terpercaya dari arus konten yang sangat beragam, cepat, dan tidak selalu akurat.

Selain dominasi informasi dari media sosial yang memengaruhi preferensi politik

pemilih pemula di Taopa, pengaruh tersebut dapat dianalisis lebih dalam melalui tiga orientasi utama: kognitif, afektif, dan evaluatif. Dari aspek kognitif, paparan informasi yang berlimpah di media sosial membentuk pengetahuan dasar pemilih pemula tentang kandidat, partai politik, maupun mekanisme pemilu. Pengetahuan ini, meskipun sering kali belum utuh, menjadi landasan awal mereka dalam memahami realitas politik. Pada sisi afektif, interaksi emosional dengan konten politik, seperti narasi kampanye yang menyentuh identitas, nilai budaya, atau perasaan ketidakpuasan, turut membangun ikatan psikologis pemilih pemula dengan figur tertentu. Sementara itu, orientasi evaluatif muncul ketika pemilih pemula mencoba menimbang dan menilai kredibilitas tokoh politik atau partai berdasarkan informasi yang diperoleh, baik dari rekam jejak, janji kampanye, maupun opini publik yang tersebar di media sosial. Dengan demikian, media sosial bukan hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga ruang yang menstimulasi ketiga orientasi tersebut secara bersamaan, sehingga preferensi politik pemilih pemula tidak terbentuk secara linear, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara pengetahuan, emosi, dan kemampuan menilai.

1. Orientasi Kognitif

Kognitif dalam konteks preferensi politik pemilih pemula memang tidak dapat dilepaskan dari peran media sosial sebagai sumber utama informasi politik di era digital. Media sosial menyediakan akses yang sangat luas bagi pemilih pemula di desa Taopa untuk memperoleh wawasan tentang kandidat, partai

politik, visi-misi, hingga mekanisme teknis pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dengan fitur interaktifnya, media sosial memungkinkan informasi disebarkan secara cepat dan masif, sehingga membentuk kerangka berpikir awal yang menjadi dasar pengetahuan politik pemilih pemula. Akan tetapi, karakter media sosial yang cenderung menonjolkan popularitas dan narasi viral membuat orientasi kognitif pemilih pemula sering kali tidak berkembang secara komprehensif, melainkan hanya bersifat parsial. Informasi yang mereka serap lebih banyak didasarkan pada daya tarik figur atau konten yang ramai diperbincangkan, bukan pada kedalaman substansi kebijakan. Hal ini memperlihatkan ambivalensi media sosial, di satu sisi ia berpotensi memperkuat literasi politik melalui paparan informasi yang berulang, namun di sisi lain dapat menjadi hambatan serius ketika informasi yang diterima tidak tervalidasi kebenarannya, sehingga orientasi kognitif pemilih pemula tetap rapuh dan rentan terhadap manipulasi.

Dalam menghadapi deras arus informasi politik, dalam aspek kognitif pemilih pemula harus mampu berpikir kritis dalam memilih dan memilah informasi yang diterima. Proses kognitif ini mencakup kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, hingga mengevaluasi informasi yang bersumber dari media sosial, kampanye politik, maupun lingkungan sekitar. Jika tidak dilakukan dengan cermat, informasi yang bias atau manipulatif dapat membentuk pola pikir yang dangkal dan emosional. Sebaliknya, ketika pemilih pemula mampu mengolah informasi secara kritis, mereka akan membangun preferensi politik

yang matang, yakni keputusan yang tidak sekadar mengikuti tren viral, tetapi berdasarkan penilaian rasional terhadap visi, misi, dan rekam jejak kandidat atau partai politik. Kematangan kognitif inilah yang kemudian menjadi dasar kuat dalam menggunakan hak politik, sehingga suara yang diberikan mencerminkan kesadaran, tanggung jawab, dan orientasi pada kepentingan bersama, bukan sekadar pilihan instan tanpa pertimbangan logis.

Temuan (Nurdin, Hamim, & Mahmud, 2023) yang menyebut pengetahuan politik pemilih pemula masih rendah akibat kurangnya informasi memperlihatkan lemahnya aspek kognitif mereka dalam memahami sistem, aktor, dan isu politik. Minimnya kemampuan kognitif ini membuat pemilih pemula lebih rentan menerima informasi mentah tanpa melalui proses analisis kritis, terutama ketika sebagian besar sumber informasi hanya pada satu arah. Sementara itu, pandangan (Prasetya, 2018) bahwa pemilih pemula tidak hanya menentukan hak politik berdasarkan rasionalitas, tetapi juga dipengaruhi aspek sosiologis dan psikologis, menunjukkan bahwa preferensi politik mereka lahir dari interaksi kompleks antara kognisi, lingkungan sosial, dan kondisi emosional. Oleh karena itu, untuk membentuk preferensi politik yang matang, pemilih pemula perlu mengembangkan literasi digital dan keterampilan kognitif agar dapat menimbang informasi secara rasional meskipun tetap berada dalam lingkaran pengaruh sosial dan psikologis yang kuat.

Pada konteks ini, pembentukan pemilih pemula yang cerdas dan kritis sangat

bergantung pada sejauh mana aspek kognitif mereka berkembang dalam memahami partai politik maupun tokoh politik yang terlibat dalam kontestasi pemilu serentak 2024. Kognisi yang kuat memungkinkan pemilih pemula tidak hanya mengenali nama atau popularitas kandidat, tetapi juga menganalisis visi-misi, rekam jejak, serta konsistensi sikap politik yang ditampilkan. Dengan demikian, preferensi politik yang lahir akan matang karena didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan sekadar ikut-ikutan atau terpengaruh isu viral. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas keputusan politik, di mana pemilih pemula mampu memilih calon terbaik yang diyakini mampu menjalankan roda pemerintahan, baik pada ranah eksekutif maupun legislatif. Sejalan dengan pandangan tersebut, dalam temuan (Alhadar, Sahi, & Katili, 2024), pendidikan politik berperan penting bukan hanya dalam memberi pengetahuan tentang proses demokrasi, tetapi juga menanamkan pola pikir kritis, etis, dan tanggung jawab politik. Dengan dukungan pendidikan politik, media sosial dapat diarahkan sebagai ruang literasi politik yang sehat, sehingga pemilih pemula terbentuk menjadi individu yang sadar, kritis, dan rasional dalam menentukan hak pilihnya.

2. Orientasi Afektif

Orientasi afektif pemilih pemula dapat dipahami sebagai sikap emosional, perasaan, serta keterikatan psikologis mereka terhadap politik, partai, maupun figur tertentu. Seorang profesor politik mungkin akan menjelaskan bahwa afeksi ini bukan sekadar soal suka atau tidak suka, tetapi melibatkan proses pembentukan identitas politik yang bersifat

jangka panjang. Pada tahap awal, pemilih pemula biasanya mengandalkan pengalaman pertama, cerita keluarga, maupun pergaulan sosial untuk menentukan posisi emosional mereka terhadap politik. Rasa simpati, kepercayaan, atau bahkan antipati yang muncul bisa membentuk fondasi penting dalam preferensi politik berikutnya. Orientasi afektif ini sering kali lebih kuat pengaruhnya dibanding orientasi kognitif, sebab emosi cenderung bertahan lebih lama daripada informasi faktual yang mudah berganti.

Dalam konteks media sosial, orientasi afektif pemilih pemula semakin diperkuat karena platform digital menjadi ruang ekspresi emosional yang sangat intens. Melalui konten visual, narasi singkat, hingga interaksi komentar, pemilih pemula kerap membangun kedekatan emosional dengan tokoh politik tertentu. Dengan demikian, unggahan yang menampilkan sisi humanis kandidat dapat memicu rasa empati yang berlanjut pada keterikatan emosional. Sebaliknya, kampanye negatif atau penyebaran meme politik bisa memunculkan rasa antipati yang melekat kuat pada citra kandidat lawan. Dengan kata lain, media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga mesin pembentuk orientasi afektif yang mengikat pemilih pemula pada preferensi politik tertentu, baik secara positif maupun negatif.

Temuan Anwar (2016) menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih pemula pada umumnya masih berada pada taraf yang rendah. Hal ini tercermin dari minimnya pemahaman dasar mengenai sistem politik, kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi aktif

dalam proses demokrasi, serta dominasi evaluasi maupun perasaan negatif yang mereka arahkan kepada objek politik, baik partai maupun figur tertentu. Situasi tersebut mengisyaratkan bahwa pemilih pemula kerap memandang politik dengan penuh keraguan, bahkan membangun jarak emosional yang cukup signifikan. Bagi mereka, politik tidak selalu dipersepsikan sebagai sesuatu yang relevan dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan sehari-hari, melainkan dianggap sebagai ruang penuh konflik kepentingan yang sulit dipahami maupun dimasuki.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Supriyadi (2019), yang menegaskan bahwa orientasi politik pemilih pemula mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Orientasi ini ditandai dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan kesadaran untuk berpartisipasi melalui tindakan nyata seperti menggunakan hak pilih. Selain itu, perasaan dan penilaian mereka terhadap objek politik baik partai maupun tokoh lebih condong pada arah yang positif. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran dari sikap skeptis menuju keterlibatan yang lebih optimis, di mana pemilih pemula tidak hanya memahami pentingnya politik, tetapi juga melihatnya sebagai sarana partisipasi yang bermakna dalam menentukan masa depan bersama.

Atas hal tersebut, bahwa sikap pemilih pemula terhadap partai politik maupun figur calon pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan serta preferensi politik yang mereka miliki. Artinya, orientasi yang terbentuk tidak berdiri sendiri, melainkan

merupakan hasil dari proses pemahaman, pengalaman, dan keterpaparan informasi politik yang diterima. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas preferensi politik pemilih pemula, diperlukan langkah nyata melalui pendidikan politik dan penguatan literasi politik. Upaya ini penting agar mereka tidak sekadar mengikuti arus opini yang beredar, tetapi mampu menilai secara kritis setiap informasi dan narasi politik yang muncul.

Fenomena kontemporer memperlihatkan bahwa media sosial menjadi medium dominan dalam membentuk preferensi politik generasi muda. Banyak figur politik maupun para pendukung aktif menggunakan platform digital untuk melakukan promosi, menyebarkan gagasan, serta membangun citra diri. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pemilih pemula untuk memperoleh informasi lebih cepat, namun sekaligus menghadirkan tantangan berupa potensi bias informasi, manipulasi opini, dan polarisasi. Dengan demikian, pendidikan politik dan literasi yang kuat menjadi benteng penting agar pemilih pemula tidak hanya terpapar, tetapi juga mampu memfilter, menganalisis, serta menentukan pilihan politiknya secara lebih rasional dan bertanggung jawab.

3. Orientasi Evaluatif

Orientasi evaluatif dalam konteks politik dimaknai sebagai kemampuan individu dalam memberikan penilaian, pertimbangan, atau evaluasi terhadap objek politik seperti partai, program, kebijakan, maupun figur calon. Pada pemilih pemula, orientasi evaluatif ini menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana mereka mampu menilai politik secara

kritis dan rasional. Evaluasi tersebut biasanya muncul dari kombinasi antara pengetahuan yang dimiliki, pengalaman politik yang terbatas, serta paparan informasi yang mereka terima sehari-hari. Dalam tahap awal, orientasi evaluatif pemilih pemula sering kali masih sederhana, misalnya hanya menilai berdasarkan citra, popularitas, atau simbol-simbol tertentu, bukan pada substansi gagasan maupun rekam jejak kandidat.

Menjelang Pemilu 2024, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk orientasi evaluatif pemilih pemula. Digitalisasi menjadi ruang utama bagi mereka untuk mendapatkan informasi politik, mulai dari kampanye resmi hingga opini publik yang tersebar luas. Dampaknya bisa bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, media sosial memungkinkan pemilih pemula memperoleh akses cepat dan mudah terhadap visi-misi, rekam jejak, serta gagasan kandidat, sehingga dapat memperkaya dasar pertimbangan mereka. Namun, di sisi lain, arus informasi yang tidak terfilter seperti hoaks, propaganda, dan konten manipulative berpotensi menciptakan penilaian yang keliru. Evaluasi politik yang terbentuk akhirnya bisa dipengaruhi oleh emosi sesaat atau popularitas semu, bukan oleh analisis substansial.

Dalam perspektif kritis, kondisi ini menuntut adanya penguatan literasi digital dan literasi politik di kalangan pemilih pemula. Tanpa bekal tersebut, orientasi evaluatif mereka menjelang Pemilu 2024 sangat rentan diarahkan oleh framing media sosial yang sengaja dibentuk untuk menguntungkan pihak tertentu. Dengan literasi yang memadai, pemilih

pemula tidak hanya akan mampu menilai secara objektif, tetapi juga dapat menghindari jebakan narasi yang menyesatkan, sehingga preferensi politik yang dihasilkan lebih mencerminkan pilihan sadar dan rasional, bukan sekadar efek dari arus viral di dunia maya. Oleh sebab itu, pemilih pemula harus memilih dan memilah dalam memahami informasi yang beredar, karena dapat berimplikasi terhadap pilihan pada saat menentukan hak politik.

Temuan Meilinda (2021) memperlihatkan bahwa preferensi politik pemilih pemula tidak bisa direduksi hanya pada pertimbangan rasional, seperti penilaian terhadap program, visi-misi, ataupun rekam jejak kandidat. Rasionalitas memang hadir sebagai salah satu faktor, tetapi bukan menjadi satu-satunya dasar yang mengarahkan pilihan politik generasi muda. Pemilih pemula berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat, sehingga aspek sosial, terutama keluarga, memegang peran penting. Lingkungan keluarga, khususnya orang tua, masih menjadi rujukan utama dalam menentukan sikap politik pemilih pemula. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa orang tua dianggap lebih matang, berpengalaman, dan memahami dinamika politik, sehingga pandangannya dipandang layak diikuti. Tidak jarang pemilih pemula memilih untuk menyesuaikan pilihan politiknya dengan arahan orang tua, baik karena rasa hormat, tradisi kepatuhan, maupun keengganan untuk menentang keputusan keluarga. Dengan demikian perlunya penguatan untuk meningkatkan preferensi pemilih pemula agar

menjadi pemilih cerdas pada pemilu serentak tahun 2024.

SIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas menunjukkan bahwa media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan preferensi politik pemilih pemula menjelang Pemilu Serentak 2024. Besarnya jumlah pemilih pemula yang mencapai lebih dari separuh total pemilih nasional menjadikan kelompok ini sebagai penentu arah demokrasi, sehingga kualitas pilihan mereka akan sangat menentukan kepemimpinan bangsa. Preferensi politik pemilih pemula tidak hanya lahir dari pertimbangan rasional mengenai program atau visi-misi kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga dan figur masyarakat yang dianggap lebih berpengalaman. Media sosial memperkuat dinamika ini dengan menyediakan arus informasi yang luas, cepat, dan interaktif, meskipun juga menyimpan risiko berupa hoaks dan propaganda. Dari sisi orientasi kognitif, media sosial membentuk pengetahuan awal tentang politik meski sering kali masih parsial; dari sisi orientasi afektif, ia membangun kedekatan emosional yang dapat memunculkan simpati maupun antipati terhadap tokoh politik; sementara dari sisi orientasi evaluatif, media sosial memberi ruang bagi pemilih untuk menilai kandidat, walau tidak jarang terjebak pada popularitas semu atau narasi viral. Dengan demikian, kualitas preferensi politik pemilih pemula sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam mengolah ketiga orientasi tersebut secara kritis melalui literasi digital dan

literasi politik, agar keputusan yang diambil tidak sekadar reaktif, tetapi benar-benar cerdas, rasional, dan relevan bagi masa depan demokrasi Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhadar, S., Sahi, Y., & Katili, P. P. (2024). Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024: (Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1115-1123.
- Anwar, H. (2016). Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di SMK Negeri 1 Pontianak. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1-11.
- Aziza, A. (2022). Penggunaan Instagram Sebagai Literasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Barru Tahun 2020. Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Effendy, O. U. (2022). Media sosial dan komunikasi politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efriza. (2012). Political Explore Sebuah kajian Ilmu Politik. Bandung: Alfabeta.
- Ganewati, W. (2009). Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: LIPI.
- Hamid, S. A., & Hamim, U. (2023). Sosialisasi Literasi Politik Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula

- Di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur. Jurnal Pengabdian Pedagogika, 67-78.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 59-68.
- Mahmud, R., Ahmad, N., Dahiba, H., & Nurdin, J. (n.d.). Pendidikan Politik Bagi Siswa Di Sma Negeri 1 Telaga Menjelang Pemilu Serentak 2024. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2040-2048.
- Meilinda, Y. (2021). Preferensi Politik Pemilih Milenial Dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018. *JDPL (Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal)*, 67-78.
- Nurdin, J., Hamim, U., & Mahmud, R. (2023). Orientasi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024 Di SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1668–1679.
- Prasetya, A. (2018). Preferensi politik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Di Kota Madiun. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 112-119.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2019). Orientasi Politik Pemilih Pemula Mahasiswa Unisri Dalam Pemilukada Jawa Tengah 2018. *Research Fair Unisri*, 310-322.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Wantu, S. M., Mahmud, R., Monoarfa, R., & Nurdin, A. (2023). Penguatan Literasi Siswa Menjadi Pemilih Cerdas Menjelang Pemilu 2024 di SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2059-2067.
- Yunus, A., Tamma, S., & Ekawaty, D. (2022). Yunus, Ariana, Sukri Tamma, and Dian Ekawaty. "Kebijakan Pendidikan dan Media Sosial Sebagai Faktor Pembentukan Preferensi Politik Pemilih Pemula di Kota Makassar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65-80.
- Zaky, M. (2009). *Buku Panduan Pendidikan Bagi Pemilih Pemula*. Yogyakarta: PKBI DIY.